

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memelihara kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih mempertahankan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur kemajuan suatu daerah dengan salah satu faktornya adalah investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa maupun mengatur perekonomian memerlukan pembiayaan. Sumber pembiayaan utama salah satunya berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Besarnya PAD mencerminkan usaha dan inovasi daerah dalam memanfaatkan sumber daya sebagai potensi daerahnya.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sumber penerimaan dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan dari hasil Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintahan, pembangunan sektor fisik, sektor ekonomi, dan sektor lainnya. Peranan Kabupaten Sanggau dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang juga dapat dijadikan indikator keberhasilan desentralisasi fiskal. Melihat realisasi pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau pada tahun 1994–2012 dengan kondisi keuangan Kabupaten Sanggau masih menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap Pemerintah Pusat dan Propinsi. Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber pendapatan di Kabupaten Sanggau ternyata sumbangan PAD terhadap pendanaan dalam APBD masih terlihat relatif kecil dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD Kabupaten Sanggau hanya 3,20% per tahun. Hal ini menyebabkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sanggau belum bisa untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan pendanaan belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau. Menurut Tambunan (2006), “salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD”.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau
Tahun 1994 - 2012
(Jutaan Rupiah)

Anggaran Penerimaan Daerah				
Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total
1994	778.192,00	33.577.746,00	3.456.041,00	37.811.979,00
1995	763.910,00	40.502.806,00	4.016.123,00	45.282.839,00
1996	1.056.121,00	44.777.978,00	2.842.125,00	48.676.224,00
1997	1.484.656,00	55.971.921,00	5.587.256,00	63.043.833,00
1998	3.578.904,00	83.880.677,00	11.540.833,00	99.000.414,00
1999	1.746.503,00	84.265.172,00	9.805.744,00	95.817.419,00
2000	2.309.750,00	49.135.476,00	4.514.496,00	55.959.722,00
2001	3.791.780,00	145.667.881,00	2.525.745,00	151.985.406,00
2002	6.564.770,00	226.445.180,00	2.389.530,00	235.399.480,00
2003	8.575.080,00	274.736.550,00	10.844.200,00	294.155.830,00
2004	10.343.170,00	272.410.490,00	22.433.040,00	305.186.700,00
2005	11.160.260,00	233.227.260,00	18.460.250,00	262.847.770,00
2006	14.690.005,00	423.498.007,00	16.348.440,00	454.536.452,00
2007	16.397.246,00	517.799.830,00	2.697.851,00	536.894.927,00
2008	23.896.878,00	574.217.283,00	11.345.623,00	609.459.784,00
2009	25.485.202,00	558.756.928,00	38.630.372,00	622.872.502,00
2010	20.524.884,00	558.168.117,00	66.885.081,00	645.578.082,00
2011	35.380.480,00	631.356.798,00	98.208.113,00	764.945.391,00
2012	43.604.394,00	736.954.950,00	91.031.211,00	871.590.555,00

Sumber : DJPK.KEMENKEU.RI

PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan.

Kuncoro, (2007: 153), menyebutkan bahwa peningkatan pendapatan diikuti dengan pertumbuhan belanja daerah yang ikut meningkat. Selain itu pada saat pendapatan pemerintah daerah menurun maka juga diikuti oleh penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan PAD. Kausalitas dari pengeluaran (Belanja) menuju kepada penerimaan (PAD) berarti bahwa pengeluaran berubah sebelum terjadi perubahan penerimaan. Hal ini valid ketika kenaikan pengeluaran tersebut diciptakan oleh kejadian-kejadian khusus yang menyebabkan pemerintah menaikkan pajak agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik.

Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah, Darise, (2006: 131).

Melihat realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau pada tahun 1994-2012 dengan kondisi keuangan Kabupaten Sanggau setiap tahun menunjukkan peningkatan belanja daerah baik dari segi kontribusi belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang menggambarkan adanya kemajuan atau perkembangan dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Sanggau. Dari tabel 1.2 realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau selama sembilan belas tahun dari tahun anggaran 1994-2012 yang menunjukkan bahwa pada umumnya mengalami peningkatan, besar kecilnya belanja daerah ini sangat dipengaruhi atau sangat tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka belanja daerah juga akan semakin besar pula. lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau
Tahun 1994 - 2012
(Jutaan Rupiah)

Anggaran Belanja Daerah			
Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja langsung	Total
1994	20.533.891,00	16.527.821,00	37.061.712,00
1995	26.082.023,00	19.155.519,00	45.237.542,00
1996	30.187.394,00	21.509.283,00	51.696.677,00
1997	35.742.426,00	28.105.122,00	63.847.548,00
1998	68.520.401,00	24.537.431,00	93.057.832,00
1999	57.663.516,00	30.232.083,00	87.895.599,00
2000	62.265.881,00	29.639.019,00	91.904.900,00
2001	132.345.900,00	70.413.500,00	202.759.400,00
2002	166.907.450,00	70.095.960,00	237.003.410,00
2003	241.037.830,00	38.355.250,00	279.393.080,00
2004	254.942.990,00	49.592.290,00	304.535.280,00
2005	214.809.760,00	50.320.750,00	265.130.510,00
2006	307.927.002,00	120.782.320,00	428.709.322,00
2007	375.197.902,00	151.089.273,00	526.287.175,00
2008	453.699.484,00	141.248.926,00	594.948.410,00
2009	360.727.866,00	259.435.538,00	620.163.404,00
2010	373.713.816,00	275.549.392,00	649.263.208,00
2011	416.784.519,00	314.116.212,00	730.900.731,00
2012	458.943.842,00	423.492.617,00	882.436.459,00

Sumber : DJPK.KEMENKEU.RI

Dari total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau, dapat diakumulasikan sebesar 66,59% per tahun kontribusi anggaran belanja tidak langsung dan 33,41% per tahun kontribusi anggaran belanja langsung terhadap total belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau.

Mankiw, (2006: 157) salah satu komponen dalam permintaan agregat (*aggregate demand* [AD]) adalah pengeluaran pemerintah dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah (G) di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peranan pemerintah sangatlah penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari PDB maka peningkatan pertumbuhan berarti peningkatan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang.

Definisi dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah perkembangan kegiatan

ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Menurut Sukirno, (2004: 265) mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai besar yang diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional pada periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Sanggau
Tahun 1994 - 2012

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1994	12.18%
1995	13.93%
1996	1.34%
1997	1.32%
1998	1.33%
1999	6.14%
2000	6.96%
2001	2.22%
2002	5.43%
2003	3.17%
2004	7.96%
2005	3.35%
2006	8.23%
2007	5.48%
2008	3.49%
2009	5.95%
2010	4.15%
2011	4.61%
2012	5.92%

Sumber : BPS Kabupaten Sanggau

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditunjukkan dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Dalam era otonomi ini, dengan didukung situasi yang relatif kondusif,

perekonomian Kabupaten Sanggau secara agregat cukup dinamis. Meski sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis sebagai dampak krisis pertengahan tahun 1996-1998, yakni mencapai angka rata-rata minus 1,33 %, namun mulai tahun 2000 mulai menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.96%, dan pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau mencapai angka tertinggi selama Sembilan belas tahun dengan kontribusi sebesar 8.23%.

Dari Tabel 1.1, Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 yang menjelaskan kontribusi PAD terhadap realisasi pendapatan dalam APBD Kabupaten Sanggau masih rendah dengan rata-rata 3,20% per tahun. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sanggau terlihat rendah tetapi jika dari pertumbuhan dengan nilai nominal PAD Kabupaten Sanggau setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seiring dengan semakin besar peningkatan realisasi pendapatan daerah berarti setiap tahun semakin besar realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sanggau dengan kontribusi rata-rata belanja tidak langsung 66,59% per tahun dan belanja langsung 33,41% per tahun sehingga diharapkan dengan meningkatnya belanja daerah bisa memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau ternyata berfluktuasi, rata-rata hanya 5,43 % per tahun.

Berdasarkan kondisi Pemerintah Kabupaten Sanggau, beberapa persoalan keuangan daerah yang dihadapi yaitu, ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau kepada subsidi dari pemerintah pusat/propinsi yang tercermin dalam besarnya bantuan dana perimbangan. Kurangnya usaha serta rendahnya kemampuan daerah dalam pengelolaan untuk menggali potensi

sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau mengalami fluktuasi.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulisan skripsi ini. Rumusan masalah ini diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan skripsi ini.

Adapun pokok-pokok masalah yang dapat diambil untuk penulisan skripsi ini adalah.

1. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sanggau?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sanggau.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak, antara lain.

1. Bagi akademis diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan menambahkan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi pembangunan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap penelitian sejenis yang telah ada serta juga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberi wawasan dan masukan kepada pemerintah selaku penentu kebijakan dalam perencanaan, terutama dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi agar tercapai pembangunan daerah yang merata dan memajukan perekonomian daerah.